

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perhatian sosial cenderung diakui sebagai suatu respon perusahaan yang signifikan untuk berkomunikasi antara perusahaan dan masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (Sun, Aly Salama, Hussainey Khaled dan Habbash, 2010). Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan.

Pentingnya aktivitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (pertanggungjawaban sosial perusahaan) bagi Perseroan terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Fenomena munculnya *good corporate governance* mulai dikenal karena sering diwacanakan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, *stakeholder*, pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri akan perlunya suatu sistem yang baik dalam meningkatkan transparansi. Dewasa ini, untuk menciptakan situasi perekonomian yang baik bagi semua pihak, *good corporate governance* berkembang diberbagai perusahaan baik yang sifatnya publik maupun swasta. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) telah berdiri di Indonesia untuk menangani mengenai masalah ini. Secara logika, perusahaan yang baik harus mempunyai sistem pengendalian yang baik, jika itu dilakukan maka perusahaan akan terkendali dan menghasilkan output yang baik, maka disinilah perlunya, *good corporate governance* dalam mewujudkan semua itu, namun kenyataannya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan khususnya di Indonesia masih relatif rendah, maka tidak heran jika perusahaan khususnya di Indonesia umumnya belum dapat maksimal secara kualitas (willyz, 2010).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (publikasi FCGI). GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholders*-nya. Perusahaan harus memperhatikan hal tersebut karena dalam operasionalnya perusahaan tidak hidup sendiri, melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga lingkungannya agar secara timbal balik, baik perusahaan maupun

masyarakat tidak ada yang dirugikan.

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga mampu mengurangi aktivitas menyimpang seperti rekayasa isi laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya (Kaihatu, 2006). Selain itu, prinsip *responsibility* dalam penerapan GCG juga dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR tidak terlepas dari penerapan GCG. Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya dilakukan oleh Said, et al (2009) yang meneliti perusahaan – perusahaan di Malaysia yang telah terdaftar sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitiannya, Said, et al (2009) mengambil tujuh karakteristik *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, independensi *board size*, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional, yang diuji hubungannya dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hasil penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) yang menemukan bahwa semakin besar kepemilikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini didukung oleh Said, et al (2009) menunjukkan hanya dua variabel yang berhubungan dengan CSR *disclosure*, yaitu

kepemilikan oleh pemerintah dan independensi *board size*. Keduanya positif berkorelasi dengan tingkat pengungkapan CSR, dimana variabel yang paling signifikan adalah kepemilikan oleh pemerintah. Kepemilikan pemerintah mendorong lebih banyak pengungkapan sosial. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Huafang dan Jianguo (2007) yang menemukan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan lain selain *government ownership* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan. Penelitian oleh Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2009). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan pengungkapan CSR. Hasil ini berbeda dengan penelitian Said, et al (2009) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR.

Selain struktur kepemilikan di atas, terdapat pula kepemilikan oleh asing. Rustiarini (2009) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Menurut Said, et al (2009), perusahaan menggunakan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai strategi untuk mendapatkan arus masuk modal lanjutan dari investor asing. Namun, hasil berbeda ada pada penelitian Amran dan Devi (2008), dan Said, et al (2009) yang

menemukan hubungan negatif antara kepemilikan asing dan luas pengungkapan CSR. Menurut Nike N.A. dan Nur C. (2009) kepemilikan saham oleh institusi dan pihak asing masih rendah, sehingga belum mampu mendorong peningkatan pengungkapan CSR di Indonesia.

Karakteristik *corporate governance* yang lain adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan yaitu untuk mengawasi pengelola perusahaan atau manajemen bertindak dengan benar. Veronica dan Sumin (2009) menemukan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, maka pengungkapan CSR makin luas. Berbeda dengan Raheja (2003) dalam Said, *et al* (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan maka semakin menurun kemampuan pengendalian perusahaan akibat kurangnya komunikasi yang efektif, sulitnya koordinasi, serta sulitnya pengambilan keputusan dan cenderung dikendalikan oleh CEO. Hal-hal itulah yang akan menyebabkan rendahnya kualitas pengungkapan sosial perusahaan karena ketidakmampuan melaksanakan peran secara efisien.

Kepemilikan Institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi (oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain) dalam sebuah perusahaan. Penelitian Khodadaddi, *et al.* (2010) menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Hal tersebut karena institusi akan memantau perkembangan investasinya pada suatu perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan pengendalian yang tinggi atas tindakan manajemen (Rustiarini, 2009).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Empat variabel bebas dari karakteristik *corporate governance* diambil dari penelitian Said, et al (2009) yaitu ukuran dewan komisaris, independensi *board size*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Dan satu variabel bebas diambil dari penelitian Khodadaddi, et al (2010) mengenai Kepemilikan Institusional.

Ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian yang menguji variabel serupa dan rendahnya kualitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia bila dibandingkan dengan negara Malaysia mendorong penulis untuk meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (GCG) terhadap Tanggung jawab Perusahaan (CSR)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Hubungan antara pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti internasional maupun nasional. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian variabel dependen pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size*. Adanya perbedaan tahun penelitian untuk melihat sejauh mana perbedaan hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul:

“PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN”.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian ini adalah tahun 2015.
3. Faktor yang diteliti sebagai variable bebas adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan yang menjadi variabel tidak bebas adalah tata kelola perusahaan yang diukur dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size*.
4. Penelitian ini merupakan replikasi dari Said et al. (2009) dengan menggunakan empat variabel *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, independensi board size, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing. Dan peneliti juga menambahkan satu variabel dari penelitian Khodadaddi et al. 2010 mengenai kepemilikan institusional.

1.4. Penelitian Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian sebelumnya, maka permasalahan ini akan diukur menggunakan proksi (representasi dari *construct* yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai) Ghazali (2006) dan akan dibahas dalam penelitian

ini adalah :

1. Apakah tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah tata kelola perusahaan dengan proksi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah tata kelola perusahaan dengan proksi *board size* berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
6. Apakah tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, *board size* secara simultan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan asing berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi komisaris independen berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi *board size* berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, *board size* secara simultan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberi kontribusi tambahan pengetahuan (kepuustakaan) dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Akuntansi dan Manajemen terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi tanggung jawab sosial..

2. Manfaat Praktisi

Dapat dijadikan tolak ukur serta masukkan para eksekutif dalam mengambil atau membuat keputusan yang efektif dan efisien terhadap aktifitas tanggung jawab sosial pada lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk pemerintah akan memperoleh partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis karena sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh perusahaan.

3. Manfaat operasional

Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan kewajiban perusahaan, khususnya perusahaan yang sudah *go public* dalam hal pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial, dan dapat mempertimbangkan hasil aktivitas operasional apa saja dalam perusahaan yang dapat meningkatkan kesadaran manajemen dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas beberapa bab, yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini terdiri atas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, model penelitian, dan pengembangan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas pemilihan objek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengujian hipotesis.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri atas deskripsi subjek penelitian, analisis dan pembahasan, uji hipotesis, dan pembahasan.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kerangka Teori

2.1.1.1 *Agency Theory*

Teori agensi ini digunakan untuk mempermudah dan memahami *Good Corporate Governance*. Dalam teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak dimana ada satu atau lebih pemilik modal (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*). *Agent* melaksanakan jasa atas nama mereka (*prinsipal*) dimana prinsipal diberikan pendelegasian wewenang untuk pembuatan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena kemungkinan agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Sesuai dengan *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson dalam Murwaningsari (2007) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Selain itu, konflik timbul juga dikarenakan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan agen. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kinerja dan keadaan perusahaan secara

keseluruhan. Sedangkan *principal* justru sebaliknya. Hal tersebut yang biasa disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi antara agen dengan *principal* dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba. Manajer berusaha melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan pemilik atau pemegang saham.

Terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan yang dikeluarkan ditujukan untuk tiga jenis pengeluaran, yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*), biaya bonding (*bonding cost*), dan biaya kerugian residual (*residual loss*).

Eisenhardt (1989) dalam Mulia (2010) menyatakan bahwa teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); dan ketiga, manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Atas dasar tiga asumsi tersebut, manajer sebagai seorang manusia kemungkinan besar memiliki kecenderungan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya (*opportunistic*).

Corporate Governance dapat membantu mengurangi biaya agensi yang mungkin terjadi. Biaya agensi yang muncul karena konflik kepentingan antara agent dan principal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam

perusahaan (Rustiarini, 2010). Mekanisme pengawasan yang dimaksud adalah mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). GCG dianggap mampu mengurangi masalah keagenan karena dengan adanya pengawasan maka perilaku oportunis manajer dan kecenderungan untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan pribadi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan. Hubungan antara tanggung jawab sosial dengan masalah keagenan adalah perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk mengurangi masalah keagenan yang terjadi.

2.1.1.2 *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang

bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Deegan (2000) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Pengungkapan aktivitas CSR dianggap sebagai salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Ghozali dan Chariri, 2007) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis sosial dan lingkungan serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Namun demikian, Gray (1995) dalam Sun *et al.*, (2010) mengemukakan motivasi tersendiri dari manajer dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. Sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan lingkungan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik (Guthrie dan Richerri, 2006).

Teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar dan selanjutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Lebih jauh lagi, legitimasi ini akan mampu meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, sehingga dengan reputasi yang baik maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut. (Harsanti, 2011).

Penelitian Ghozali dan Chariri (2007) lebih merujuk kepada tindakan CSR dilakukan karena adanya kontrak sosial perusahaan yang menggunakan sumber daya ekonomi, Deegan (2004) merujuk pelaporan CSR dilakukan perusahaan agar sesuai dengan harapan dari komunitas, dan Guthrie dan Parker (1989) merujuk bahwa melakukan tindakan CSR dilakukan untuk pencitraan/persepsi masyarakat terhadap perusahaan.

2.1.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengertian tanggung jawab sosial adalah:

“Corporate Social Disclosure (CSD) can be defined as the provision of financial and non financial information relating to an organization’s interaction with its physical and social report, as stated in corporate annual reports or separate social reports (Hackston dan Milne (1996:78))”

Artinya pengungkapan tanggung jawab sosial bisa di definisikan penyediaan informasi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan laporan fisik dan sosial, sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah .

CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Empat prinsip *good corporate governance* meliputi *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* secara harmonis dapat menimbulkan CSR yang baik. CSR yang baik juga memperhatikan hasil dan proses meliputi lima langkah : **a) engagement**. Pendekatan awal agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR, **b) assessment**. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program CSR, **c) plan of action**. Merumuskan program yang akan ditetapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat disatu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholder di pihak lain, **d) action and facilitation**. Menerapkan program yang telah disepakati bersama bisa menggunakan LSM dan pihak

perusahaan, **e)** *evaluation and termination or reformation*. Menilai sejauh mana keberhasilan program CSR di lapangan (Suharto (2008:3).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan dengan menggunakan checklist yang diadopsi dari penelitian Hackston dan Milne (1996) dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam tujuh kategori yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Sembiring E.R. (2005) mengatakan ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. Berdasarkan peraturan Bapepam no. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda. Item pengungkapan sektor manufaktur terdapat 78 item.

Diharapkan dengan semakin banyak item pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dapat memberikan informasi ke *stakeholder* bahwa perusahaan telah berkomitmen memberikan perannya dalam hubungan sosial dan telah menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berikut 78 item pengungkapan CSR :

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi.
2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi.
3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi.
4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas
6. Penggunaan material daur ulang
7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah
11. Pengolahan Limbah
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan

13. Perlindungan lingkungan hidup
14. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
15. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energy
16. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
17. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energy
18. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk
19. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk
20. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan
21. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja
22. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental
23. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja
24. Menaati perusahaan standard kesehatan dan keselamatan kerja
25. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
26. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
27. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
28. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja
29. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat
30. Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial
31. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan

32. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat
33. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja
34. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan
35. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
36. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan
37. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan
38. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
39. Pengungkapan persentase gaji untuk pension
40. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
41. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
42. Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada
43. Mengungkapkan disposisi staff-dimana staff ditempatkan
44. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka
45. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. Penjualan per tenaga kerja
46. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
47. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
48. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain

49. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja
50. mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan
51. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah
52. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
53. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja
54. mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan
55. Peningkatan kondisi kerja secara umum
56. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja
57. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja
58. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya
59. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
60. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk
61. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan
62. Membuat produk lebih aman untuk konsumen
63. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
64. Pengungkapan peningkatan kebersihan /kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk

65. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
66. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
67. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000)
68. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni
69. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar
70. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat
71. Membantu riset medis
72. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni
73. Membiayai program beasiswa
74. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
75. Mensponsori kampanye nasional
76. Mendukung pengembangan industri local
77. Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat
78. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas.

2.1.1.4 Tata Kelola Perusahaan

World Bank mendefinisikan makna tata kelola perusahaan sebagai berikut : “...suatu perpaduan antara hukum, peraturan pajak perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan” (Maassen, 2000 dalam *Indonesia Corporate Governance Roadmap*, 2014 : 13).

Asas-asas GCG yang ditetapkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan, yaitu : (1) *Transparency*, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan; (2) *Accountability*, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *shareholder* dan *stakeholder*; (3) *Responsibility*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*; (4) *Independency*, perusahaan

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain; (5) *Fairness*, perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Tata Kelola Perusahaan dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Pohan (2009:114), Kepemilikan Institusional adalah presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial investor. Yang termasuk dengan pemilik institusi diantaranya adalah: pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan tanggung jawab sosial adalah investor dengan kepemilikan institusional menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela (Rawi dan Munawar (2010)).

2. Kepemilikan Manajerial

Menurut Pujiati dan Erman (2009:11), Kepemilikan Manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara

aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).

Jansen dan Meckling (1976) dalam (Siallagan dan Machfoedz 2006:5) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen.

3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan multinasional atau kepemilikan asing melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya, dimana secara tipikal berdasarkan *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Barkemeyer, 2007).

4. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh

BEI. Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, kemudian komisaris independen harus memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (Annisa dan Kurniasih; 2012:125).

FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) menyatakan bahwa komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian Negara, serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik (Meilinda dan Cahyonowati 2012:2). Menurut Puspita dan Harto (2014:3), komisaris independen mempresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik, yang cenderung mentaati peraturan perpajakan.

5. *Board Size*

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, definisi dari *board size* adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Ketua BAPEPAM Tugas dan tanggung jawab *board size* antara lain meliputi: (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya; (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan; (3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal; (4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi; (5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emitan atau Perusahaan Publik; (6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Inti dari tugas dan tanggung jawab *board size* tersebut adalah mengawasi manajemen dalam menjalankan setiap kegiatan perusahaan. Jika ada kelemahan, maka *board size* akan memberikan masukan dan saran perbaikan melalui Dewan Komisaris.

2.1.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti terdahulu, sehingga banyak terjadi kesenjangan (research gap) antara penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu

yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Berikut tabel penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
Said <i>et. Al</i> (2009)	Regresi Berganda	Var. Independen: ukuran dewan, dualitas CEO, <i>board size</i> , independen nonexecutive director, kepemilikan manajerial, asing, terkonsentrasi, dan pemerintah. Var. dependen: CSR Disclosure	Kepemilikan oleh pemerintah dan audit komite signifikan dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
Murwaning sari (2007)	Regresi Berganda	Var. independen: Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional. Var. dependen: kinerja perusahaan. Var. intervening: CSR	Kep. manajerial dan kep. Institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja Perusahaan. <i>Good Corporate Governance</i> yang diamati melalui kep. manajerial dan institusional, berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Veronica dan Sumin (2009)	Regresi Berganda	Var. independen: ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran dewan komisaris. Var. dependen: CSR Disclosure	ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure. profitabilitas dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure
Rawi dan Munawar (2010)	Regresi Berganda	Var. independen: Kepemilikan manajemen, Kepemilikan institusi, <i>leverage</i> . Var. dependen: CSR	Kep. Manajemen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Kep. Institusi dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR
Sitepu dan Hasan (2008)	Regresi Berganda	Var. independen: Ukran dewan komisaris, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas. Var. dependen: luas CSR Disclosure	Seluruh var. independen memiliki pengaruh terhadap jumlah informasi sosial yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan.

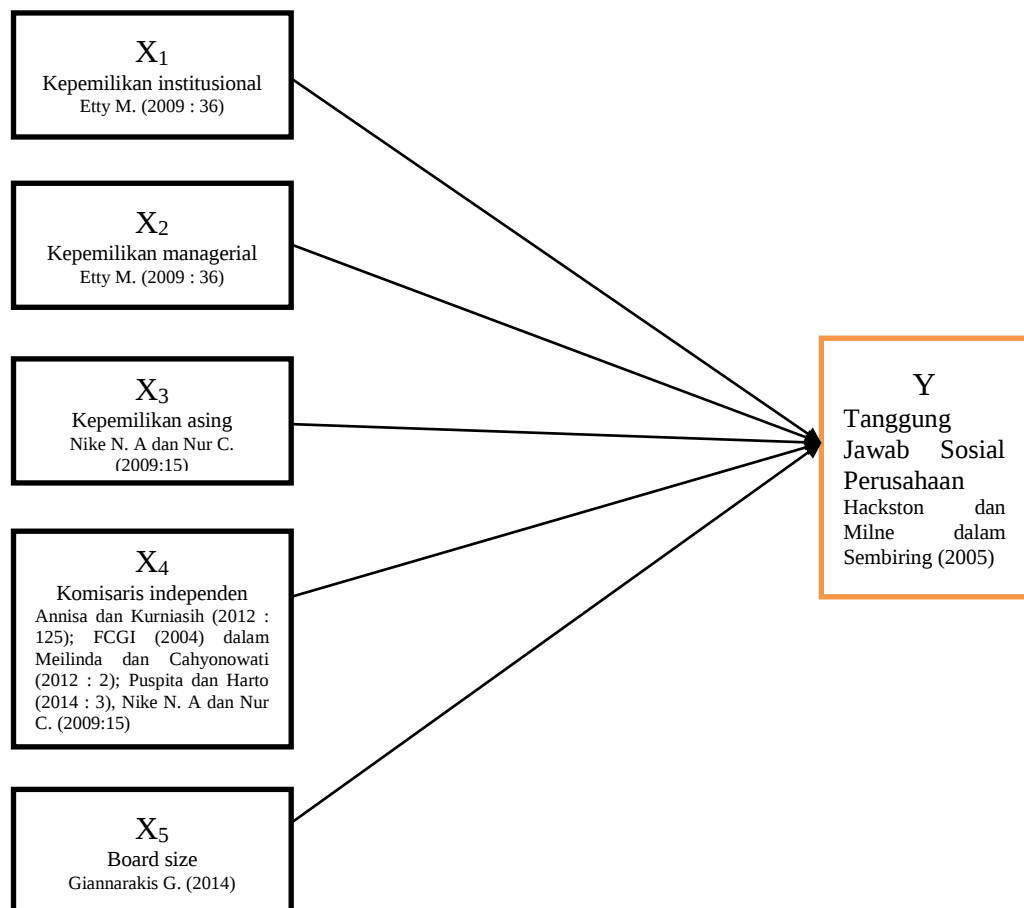
Sumber data : diolah sendiri

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lima variabel independen yang merupakan karakteristik dari Corporate Governance yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size*.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan di atas, maka disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diuji. Kerangka pemikiran disusun untuk mempermudah memahami hipotesis yang dibangun di dalam penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_{null} : \beta_1 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

2. $H_{null} : \beta_2 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

3. $H_{null} : \beta_3 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

$H_a : \beta_3 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

4. $H_{null} : \beta_4 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

- $H_a : \beta_3 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
5. $H_{null} : \beta_4 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi *board size* tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
- $H_a : \beta_4 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi *board size* berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
6. $H_{null} = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size* secara simultan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
- $H_a \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size* secara simultan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian

Untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size*, sebagai variabel independen terhadap tanggung jawab sosial sebagai variabel dependen.

3.2 Desain Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini menggunakan *explanatory research*, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (pengaruh tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size* terhadap variabel terikat (tanggung jawab sosial) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Studi ini merupakan studi kausal yaitu menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah dan data yang dikumpulkan dengan *cross-sectional* yaitu data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. (Uma S. dan Roger B. 2010 : 103 – 119)

3.3 Metode Penarikan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 yang berjumlah 122 perusahaan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *probability random sampling* hal ini dikarenakan tidak adanya kriteria sampel. Sampel diambil dengan metode *simple random sampling* yaitu mengambil sampel yang dimana setiap elemen tunggal dalam populasi punya peluang yang sama yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. (Uma S. Dan Roger B. 2010:271). Penelitian ini mengambil batas toleransi 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Total perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2015 berjumlah 122 perusahaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah data sekunder dimana sampel ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui suatu media perantara yaitu data-data yang dipublikasikan di www.idx.co.id tahun 2015.

3.5 Operasional Variabel dan Instrumen

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian, merupakan proksi atau representasi dari *construct* yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Menurut Sugiono (2007:84) *Construct* adalah abstraksi dari fenomena-fenomena yang dapat diamati dari banyak dimensi. Jadi

dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan sebagai objek pengamatan akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Variabel penelitian ini meliputi tanggung jawab sosial yang merupakan variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size*.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Proksi	Skala	Sumber Data
Tanggung jawab sosial (Y) Hackston dan Milne dalam Sembiring (2005)	$CSR_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$	Rasio	Laporan Keuangan Emiten
Kepemilikan Institusional Etty M. (2009 : 36)	Etty M. (2009 : 36) $\frac{(\text{Jumlah saham institusi} + \text{Saham Blockholder})}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$	Rasio	Laporan Keuangan Emiten
Kepemilikan Manajerial Etty M. (2009 : 36)	Etty M. (2009 : 36) $\frac{\text{Jumlah saham dimiliki manajer dan dewan komisaris}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$	Rasio	Laporan Keuangan Emiten
Kepemilikan Asing Nike N. A dan Nur C. (2009:15)	Nike N. A dan Nur C. (2009:15) $\frac{\text{Jumlah saham dimiliki pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$	Rasio	Laporan Keuangan Emiten
Komisaris Independen Annisa dan Kurniasih (2012 : 125); FCGI (2004) dalam Meilinda dan Cahyonowati (2012 : 2); Puspita dan Harto (2014 : 3), Nike N. A dan Nur C. (2009:15)	Diukur dengan menggunakan persentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris Nike N. A dan Nur C. (2009:15)	Rasio	Laporan Keuangan Emiten
<i>Board Size</i> Giannarakis G. (2014)	Jumlah direktur / komisaris dalam suatu perusahaan Giannarakis G. (2014)	Rasio	Laporan Keuangan Emiten

Sumber : Data diolah sendiri

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah analisa regresi berganda. Model yang digunakan dalam regresi ini menguji pengaruh variabel-variabel yang spesifik terhadap tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut:

$$CSR_j = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana:

CSR_j : tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur

α : konstanta

X_1 : kepemilikan institusional

X_2 : kepemilikan manajerial

X_3 : kepemilikan asing

X_4 : komisaris independen

X_5 : *board size*

ε : kesalahan residual

Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut :

Data dikumpulkan, lalu dirumuskan teknik hipotesis statistik dalam penelitian sebagai berikut :

1. $H_{null} : \beta_1 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.

2. $H_{null} : \beta_2 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.

3. $H_{\text{null}} : \beta_3 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.
 $H_a : \beta_3 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.
4. $H_{\text{null}} : \beta_4 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.
 $H_a : \beta_4 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.
5. $H_{\text{null}} : \beta_5 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi *board size* tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.
 $H_a : \beta_5 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi *board size* berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial.
6. $H_{\text{null}} = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size* secara simultan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.
 $H_a \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *board size* secara simultan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Menurut Ghazali (2006) asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan ukuran setiap variabel independen manakala yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya (Ghozali 2006).

Metode ini ditujukan untuk mendeteksi variabel-variabel mana yang menyebabkan terjadinya multikolinearitas, menurut Gujarati (2003:351) besar nilai VIF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1 - r_{ij}^2)}$$

Dimana:

VIF = *Variance Inflation Factor*

r_{ij} = Besarnya korelasi antara variabel i dan variabel j

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2006). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu Melihat grafik plot antara variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang diperoleh digunakan uji korelasi *Rank Spearman* (Gujarati, 2003:182). Rumus untuk mencari koefisien korelasi *Spearman* menurut Moh. Nazir (2011:453) adalah sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{N^3 - N}$$

Dimana:

d_i = beda antara 2 pengamatan berpasangan

N = total pengamatan

ρ = koefisien korelasi Spearman

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali 2006). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (*DW test*).

Menurut Gujarati (2003:215) untuk memeriksa adanya autokorelasi, biasanya dilakukan uji statistic *Durbin-Watson (DW)* dengan rumus sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum (\hat{u}_i - \hat{u}_{i-1})^2}{\sum \hat{u}_i^2}$$

Dimana :

$\hat{u}_i$ = Residual dari persamaan regresi periode i, sama dengan nilai
nilai $Y_i - \hat{Y}$ atau deviasi nilai observasi dari nilai peramalan.

$\hat{u}_{i-1}$ = Residual dari persamaan regresi periode i-1, sebelum periode i.

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- Bila nilai DW terletak antara batas (d_u) dan ($4-d_u$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (d_l), maka koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif.
- Bila nilai DW lebih dari pada ($4-d_l$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.

- d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.8 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali 2006). Biasanya disajikan dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Pada prinsipnya tabulasi menyajikan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif juga memberikan gambaran umum dari tipe variabel penelitian. Peneliti menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata (mean), nilai maksimum (maximum), dan nilai minimum (minimum).

3.9 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal (Ghozali 2006). Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov test*. Dalam uji *one sample Kolmogorov-Smirnov test* variabel-variabel yang mempunyai *asympt. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat

signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali 2006).

3.10 Kuantitatif Parametrik

1. Regresi Linear Berganda

Model penelitian yang digunakan adalah analisis multivariat dengan menggunakan regresi linear berganda. Model yang digunakan dalam regresi ini menguji pengaruh variabel - variabel yang spesifik terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut:

$$CSR_j = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana:

CSR_j : Tanggung Jawab Sosial perusahaan j

α : konstanta

X_1 : Kepemilikan Institusional

X_2 : Kepemilikan Manajerial

X_3 : Kepemilikan Asing

X_4 : Komisaris Independen

X_5 : *Board Size*

ε : Kesalahan Residual

2. Uji Koefisien Korelasi

Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Rumus koefisien korelasi adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1, sedangkan korelasi lemah mendekati 0. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Sebaliknya jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik (Santoso 2001).

Tabel 3.2 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Cukup kuat
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

(Sugiyono, 2010:231)

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependent. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependent (Ghozali 2006).

Rumus Uji koefisien determinasi menurut Sugiyono (2008) adalah:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi berganda

4. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak dan tepat untuk mengambil suatu keputusan dalam penelitian. Keputusan yang diambil adalah yang didasari oleh kriteria sebagai berikut (Ghozali 2006) :

- a. Bila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model tidak layak digunakan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model layak digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dengan derajat kebebasan (K-2) dan (n-1) serta tingkat ketelitian sebesar 5% dengan tingkat keyakinan 95% yang berarti bahwa pengukur hanya memperbolehkan rata-rata penyimpangan sebesar 0,05 dan kemungkinan berhasil 0,95.

Rumus Uji statistik F dapat ditulis

$$F = \frac{\frac{R^2}{(K-1)}}{\frac{1-R^2}{(n-k-1)}}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi berganda

K = Banyaknya Variabel

n = Jumlah pengamatan

5. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Adapun rumus uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Distribusi t

n = Jumlah data

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

Ada dua tahap pengujian hipotesis dalam regresi linear berganda yakni:

- a. Menentukan t_{tabel} tahap pertama adalah menentukan df. Dalam penelitian ini α yang ditentukan adalah 5%. Df diperoleh dari rumus $n-1$ atau jumlah dikurangi satu.

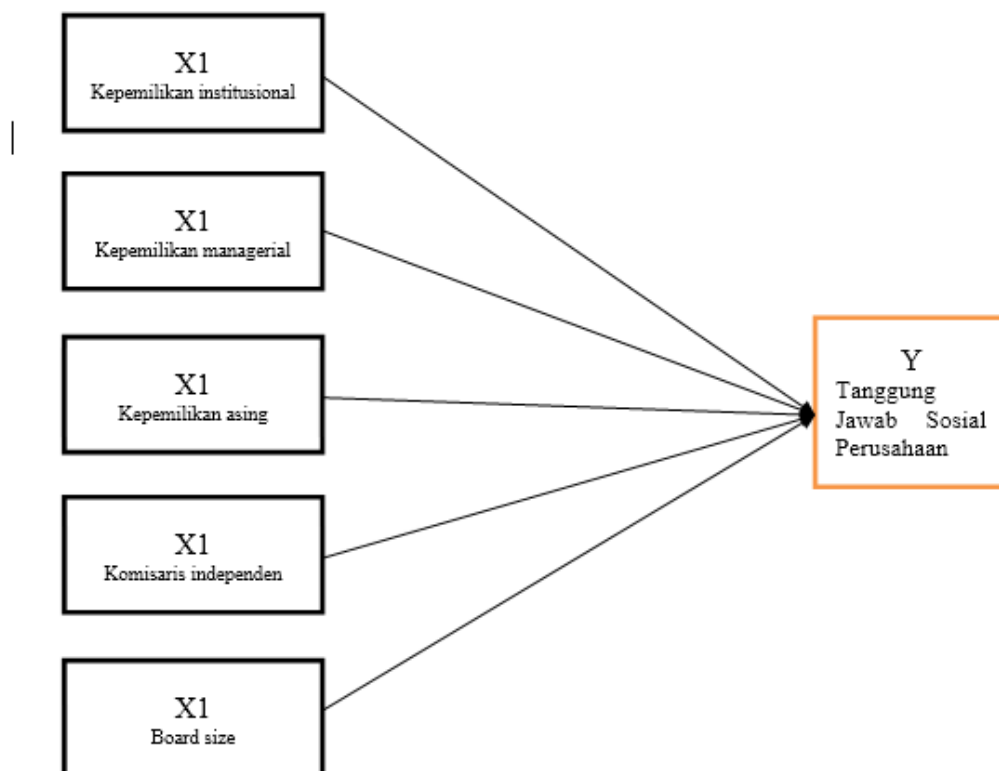
- b. Menentukan t_{hitung} dapat dilakukan pengolahan data dengan program statistik E-View for windows version 7.0 dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} :

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$: H_a diterima

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$: H_{null} diterima.

Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Gambar 3.1 Model Penelitian



Dimana :

X_1 : Kepemilikan Institusional

X_2 : Kepemilikan Manajerial

X_3 : Kepemilikan Asing

X_4 : Komisaris Independen

X_5 : *Board Size*

Y : Tanggung Jawab Sosial

$\varepsilon = \text{Error}$

3.11 Hipotesis

Adapun teknik hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. $H_{\text{null}} : \beta_1 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

2. $H_{\text{null}} : \beta_2 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

3. $H_{\text{null}} : \beta_3 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

$H_a : \beta_3 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

4. $H_{\text{null}} : \beta_4 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

$H_a : \beta_4 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

5. $H_{\text{null}} : \beta_5 = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi *Board Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

$H_a : \beta_5 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi *Board Size* berpengaruh signifikan terhadap Tanggung Jawab Sosial.

6. $H_{\text{null}} = 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *Board Size* secara simultan tidak berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Sosial.

$H_a : \beta_6 \neq 0$ tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, kepemilikan asing, komisaris independen, dan *Board size* secara simultan berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Sosial.